



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau sub kegiatan, penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
- (3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Penutup.

- (2) Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;

- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2024

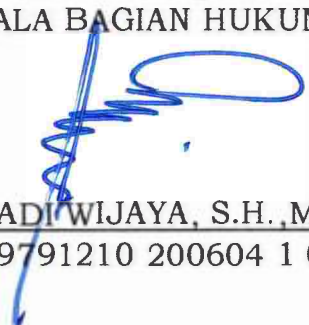
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2024

1. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam lampiran Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024 bahwa seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, begitu pula berkenaan dengan Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2024. Selain itu Pemerintah Kota Blitar juga terus melanjutkan pembangunan diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang selaras dengan tema sebelumnya yaitu: “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi”. Prioritas kebijakan selain terkait dengan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2024, juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2023 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

3. Pemokusan perencanaan pembangunan terkait DAK tahun anggaran 2024 DBHCHT dengan mengutamakan pencapaian kinerja Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; dan
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Sebagaimana pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024. P-Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi, keselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dimaksudkan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024;
- Sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS atau Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
- Sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2024 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 disertai narasi terkait hasil analisa terhadap tingkat pencapaian Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Sajikan Tabel Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Tabel Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada bab ini disajikan capaian terhadap hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan semester 1 (satu) tahun 2024 sesuai yang tertuang pada Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024, sehingga bisa dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun perubahan perencanaan dan anggaran pada semester 2 (dua) tahun 2024.

Selain itu guna melihat progres pencapaian kinerja tahunan terhadap target Renstra maka perlu disandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 meskipun tidak semua bisa disandingkan karena pada tahun 2024 terdapat perubahan renstra pada penambahan beberapa indikator tujuan dan sasaran sesuai hasil pemetaan pohon kinerja perangkat daerah.

Adapun program Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Blitar:

- 1. Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
BAGIAN PEMERINTAHAN																						
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tinggi 3,4243		Tinggi 3,353		-		-		0		Tinggi 3,4243		102,11		
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan				1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100		100		100		33,33		25		58,33		58,33		58,33		
1		213,04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	persen	100	545.591.862	158,33	117.544.801	71,43	108.146.500	71,43	1.940.500	0	12.538.000	71,43	14.478.500	71,43	132.023.301	71,43	24,2	Bagian Pemerintahan
		213.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	kelurahan	21	424.711.562	21	117.544.801	19	108.146.500	19	1.940.500	0	12.538.000	19	14.478.500	19	132.023.301	90,48	31,09	

No	Tuju an dan Sasa ran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung jawab	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14	
		213.0 4.2.0 1.001 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokum en	21	424.711.562	21	117.544.801	21	108.146.500	21	1.940.500	0	12.538.000	21	14.478.500	21	132.023.301	100	31,09		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																					100	31,09	
Predikat kinerja (%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																					90,48	31,09	
Predikat kinerja (%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (2) komitmen personil perangkat kelurahan dalam memahami tusi yang baru																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) minimnya akses data yang diperoleh untuk mengisi profil kelurahan (2) tidak lolos nya lomba kelurahan ke tahap selanjutnya sehingga penyerapan anggaran kinerja rendah																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) meningkatkan koordinasi dengan OPD pemilik data (2) mengevaluasi data dokumen lomba kelurahan yang dikirimkan ke provinsi sebagai bahan masukan pelaksanaan lomba tahun berikutnya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) mengevaluasi kembali data dokumen lomba kelurahan yang akan dikirimkan ke provinsi																							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																					71,43	24,2	
Predikat kinerja Proram (%)																					Sedang	Sangat Rendah	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																							
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah			1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tingg i - 3,42 43		Tingg i - 3,35 3		-		-		0		Tinggi -3,4243		102,11				
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan			1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasik an	%	100		100		100		33,33		25		58,33		58,33		58,33				
2		401,0 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	persen	100	7.561.490.18 3	83,3 4	3.406.714.339	100	1.713.424.15 8	0	220.391.6 72	0	426.010.886	0	646.402.558	83,34	4.053.116.8 97	0	53,6	Bagian Pemerin tahan	

No	Tuju an dan Sasa ran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
				Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	persen	100		100	3.406.714.339	100		0		0		0		100	3.406.714.339	0		Bagian Pemerin tahan
		401.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100	4.113.477.398	100	0	100	1.051.112.658	50	165.921.741	10	297.124.516	60	463.046.257	60	463.046.257	60	11,26	
				Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	persen	100		100,02		100		40		25		65		65	0	65		
				Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	persen	100		100	3.281.263.341	100		25		20		45		45	3.281.263.341	45		
				Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	persen	100		83,34		100		0		0		0		83,34	0	83,34		
		401.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	40	1.196.203.082	10	359.774.719	10	252.794.200	5	90.604.984	1	97.345.250	6	187.950.234	16	547.724.953	40	45,79	
		401.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	20	2.917.274.316	5,04	2.778.367.560	5	643.624.958	1	27.454.769	1	180.640.966	2	208.095.735	7,04	2.986.463.295	35,2	102,37	
		401.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	16		3,96	143.121.062	4	154.693.500	1	47.861.988	1	19.138.300	2	67.000.288	5,96	210.121.350	37,25		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				37,48	11,26	
Predikat kinerja (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				63,34	11,26	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
Predikat kinerja (%)																				Rendah	Sangat Rendah	
		401.0 2.2.0 4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	83,33	427.256.235	83,3 4	125.450.998	83,3 3	662.311.500	12,5	54.469.93 1	37,5	128.886.370	50	183.356.301	50	308.807.299	60	42,91	
		401.0 2.2.0 4.000 1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	32	427.256.235	8	125.450.998	8	662.311.500	1	54.469.93 1	3	128.886.370	4	183.356.301	12	308.807.299	37,5	42,91	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				37,5	42,91	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				60	42,91	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan OPD terkait urusan kewilayahan (2) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan OPD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) ketidaksinkronan usulan pembangunan oleh masyarakat dengan juklak dan juknis program RT Keren (2) adanya kegiatan Tuan Rumah BBGRM di Kota Blitar sehingga fokus ke kegiatan tersebut mengakibatkan kegiatan lainnya ditunda untuk tribulan berikutnya (3) adanya indikator baru di urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di penginputan SPM tribulan 2																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) melakukan rakor kembali antara pihak kelurahan dengan masyarakat pengusul pembangunan wilayah (2) memfokuskan kembali pencapaian indikator pembinaan lembaga kemasyarakatan pasca pelaksanaan BBGRM (3) Bagian Pemerintahan lebih aktif dalam mendampingi penginputan data pada urusan yang diampu																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) rutin memonev implementasi program RT Keren baik di Kecamatan dan Kelurahan (2) Lebih aktif lagi untuk memberikan pemahaman kepada OPD pelaksana urusan terkait indikator kinerjanya																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				0	53,6	
Predikat kinerja Program (%)																				Sangat Rendah	Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = (9+10)		12 = (7+11)		13 = (12/6)		14	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																							
BAGIAN HUKUM																							
Tujuan 2:				1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tinggi		Tinggi		-		-		0		Tinggi		102,11			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah																						-3,4243	-3,353
Sasaran 1:				1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100		100		100		33,33		25		58,33		58,33		58,33			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan																							
1		401,02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	persen	100	5.666.244.844	123	815.636.841	100	765.139.900	20	105.359.962	8,57	113.786.106	28,57	219.146.068	28,57	1.034.782.909	28,57	18,26	Bagian Hukum	
		401.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	persen	100	4.571.794.644	134	815.636.841	100	765.139.900	37,34	105.359.962	14,32	113.786.106	51,66	219.146.068	51,66	1.034.782.909	51,66	2,26		
		401.02.2.03.001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	1280	1.670.738.778	438	331.882.907	320	312.338.600	127	67.057.682	46	27.677.572	173	94.735.254	611	426.618.161	47,73			
		401.02.2.03.002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	16	1.851.474.580	4	269.162.427	4	271.810.700	5	21.567.680	4	22.025.000	9	43.592.680	13	312.755.107	81,25			
		401.02.2.03.003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	280	1.851.474.580	86	214.591.507	70	180.990.600	14	16.734.600	6	64.083.534	20	80.818.134	106	295.409.641	37,86			
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																					55,61	2,26	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																					Rendah	Sangat	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
											K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = (9+10)		12 = (7+11)		13 = (12/6)		14			
																							Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																						51,66	2,26	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																						Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan OPD terkait urusan kewilayahan (2) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan OPD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) ketidaksinkronan usulan pembangunan oleh masyarakat dengan juklak dan duknis program RT Keren (2) adanya kegiatan Tuan Rumah BBGRM di Kota Blitar sehingga fokus ke kegiatan tersebut mengakibatkan kegiatan lainnya ditunda untuk tribulan berikutnya (3) adanya indikator baru di urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di penginputan SPM tribulan 2																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) melakukan rakor kembali antara pihak kelurahan dengan masyarakat pengusul pembangunan wilayah (2) memfokuskan kembali pencapaian indikator pembinaan lembaga kemasyarakatan pasca pelaksanaan BBGRM (3) Bagian Pemerintahan lebih aktif dalam mendampingi penginputan data pada urusan yang diampu																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) rutin memonev implementasi program RT Keren baik di Kecamatan dan Kelurahan (2) Lebih aktif lagi untuk memberikan pemahaman kepada OPD pelaksana urusan terkait indikator kerjanya																								
Rata-rata capaian kinerja Prorgam (%)																						28,57		
Predikat kinerja Program (%)																						Sangat Rendah		

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA																						
Tujuan 1: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	indeks	84,25		85,15		85,155	-		-		0		85,15		101,07			
Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan				Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	%	100		100		100	50		16,67		66,67		66,67		66,67			
1		401,02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	persen	100	40.492.565.808	100	10.092.990.217	100	8.563.539.500	50	425.737.700	16,67	2.427.812.000	66,67	2.853.549.700	66,67	12.946.539.917	66,67	31,97	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		401.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Rumusan kebijakan	24	40.492.565.808	6	10.092.990.217	6 rumusan kebijakan	8.563.539.500	3	425.737.700	0	2.427.812.000	3	2.853.549.700	9	12.946.539.917	37,5	31,97	
		401.02.2.02.001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	100	40.492.565.808	25	10.092.990.217	25	8.563.539.500	9,5	425.737.700	7,5	2.427.812.000	17	2.853.549.700	42	12.946.539.917	42	31,97	
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tinggi -3,4243		Tinggi -3,353	-		-		-		Tinggi - 3,4243		102,11			
Sasaran 1:				1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan	%	100		100		100		33,33		25		58,33		58,33		58,33		

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan				Rakyat yang diimplementasikan																		
		401,02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	342.606.571	100	117.319.177	100	114.023.300	25	13.599.300	50.00	1.325.000	75	14.924.300	75	132.243.477	75	38,6	
		401.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Rumusan kebijakan	18	342.606.571	6	117.319.177	4 rumusan kebijakan	114.023.300	1	13.599.300	2	1.325.000	3	14.924.300	9	132.243.477	50	38,6	
		401.02.2.02.002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	8	342.606.571	2	117.319.177	2	114.023.300	0	13.599.300	1	1.325.000	1	14.924.300	3	132.243.477	37,5	38,6	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		401.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Doku men	8	434.661.010	2	113.402.788	2	104.215.700	1	9.051.900	1	0	2	9.051.900	4	122.454.688	50	28,17	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				43,17	31,99	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				50	31,99	
Predikat kinerja Kegiatn (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah maupun lintas sektor																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya pemahaman stakeholder sasaran fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melaksanakan sosialisasi lebih intensif kepada sasaran/stakeholder terkait penerima layanan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPД berikutnya : Perlunya persamaan persepsi antar lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				70,84	24,92	
Predikat kinerja Program (%)																				Sedang	Sangat Rendah	
2		401,03	PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNA N	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	persen	100	5.274.145.561	100	929.003.419	100	854.256.062	25	94.357.694	16,67	81.135.400,00	41,67	175.493.094	41,67	1.104.496.513	41,67	20,94	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		401.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian	rumusan kebijakan	24	3.257.192.000	6	714.666.067	6 rumusan kebijakan	651.438.400	3	86.735.930	1	74.835.400	4	161.571.330	10	876.237.397	41,67	26,9	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
				yang ditindaklanjuti																		
		401.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	8	842.184.439	2	300.491.102	2	234.376.000	3	32.565.000	0	5.290.000	3	37.855.000	5	338.346.102	62,5	40,17	
		401.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	8	2.903.251.543	2,04	183.234.588	2	220.108.200	1	11.450.930	0	3.390.000	1	14.840.930	3,04	198.075.518	38	6,82	
		401.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	16	1.023.644.479	4	230.940.377	4	196.954.200	1	42.720.000	1	66.155.400	2	108.875.400	6	339.815.777	37,5	33,2	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan(%)																				46	26,9	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				41,67	26,9	
Predikat kinerja Kegiatatn (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		401.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Dokumen	8	9.369.826.150	2	214.337.352	2	202.817.662	1	7.621.764	0	6.300.000	1	13.921.764	3	228.259.116	37,5	2,44	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		401.03.204.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	8	9.369.826.150	2,04	214.337.352	2	202.817.662	1	7.621.764	0	6.300.000	1	13.921.764	3,04	228.259.116	37,5	2,44	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan(%)																				50	2,44	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				50	2,44	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana (3) Koordinasi yang baik dengan lintas OPD dan lintas sektor anggota TPID Kota Blitar (4) Tersusunnya dokumen indentifikasi Sumberdaya air yang bermanfaat untuk pemetaan SDA, rujukan pengambilan keputusan dan manajemen pelayanan (5) Koordinasi yang baik dengan lintas sektor, terutama SDA Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Bea Cukai Blitar																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Perlambatan reformasi struktural dan kultural oleh internal terutama di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar (2) Tantangan dis-sinergitas internal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang perlu dilakukan revitalisasi pasca restrukturisasi (3) Belum teridentifikasi secara terstruktur (NIB/Nomor Induk Berusaha) dari UKM, IKM dan Ekraf binaan Perangkat Daerah (4) Belum terdapat regulasi yang menjadi pedoman pengembangan UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar (5) Belum optimalnya pelaksanaan rencana kerja strategi 4 K TPID (6) Belum terlembaganya Bank Kota Blitar sebagai program unggulan keuangan inklusif daerah (7) Belum ada komitmen tertulis tentang rencana aksi antara Satpol PP dengan Bea Cukai Blitar terkait teknis kegiatan sub penegakan hukum (pemberantasan Rokok Ilegal) dan perlu dukungan Perangkat daerah terkait lainnya untuk pencapaian program yang dibiayai DBHCHT																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Pembinaan terkait pengelolaan dan manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, mengingat Perlambatan reformasi struktural dan kultural internal (2) Melaksanakan tahapan rekrutmen Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat untuk (3) Koordinasi dengan Perangkat daerah terkait pendataan UKM, IKM dan Ekraf binaan Perangkat Daerah yang mempunyai NIB (5) Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja strategi 4 K TPID melalui koordinasi intensif sekretariat TPID (6) Pelembagaan Bank Kota Blitar sebagai program unggulan keuangan inklusif daerah melalui review perkreditan dan perbankan daerah dan rencana aksi TPKAD (7) Koordinasi lebih baik antara Satpol PP dengan Bea Cukai Blitar guna penyusunan rencana aksi																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) Menyusun regulasi pelaksanaan perda (termasuk SOP) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar (2) Menyusun regulasi pelaksanaan perda (termasuk SOP) perbankan daerah dengan pengarusutamaan pada penguatan kredit rakyat dan ketahanan pangan daerah (3) Melaksanakan rencana kerja tentang review legal policy penyelenggaraan BLUD Kota Blitar Tahun 2024 (4) Menyusun regulasi yang menjadi pedoman pengembangan UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar (5) Memasukan rencana kerja strategi 4 K TPID dalam Produk hukum daerah yang berkenaan dengan rencana pembangunan berkelanjutan (6) Pelembagaan TPKAD dalam Produk hukum daerah yang berkenaan dengan rencana pembangunan berkelanjutan (8) Sosialisasi dan Koordinasi dengan provinsi secara berkala terkait penganggaran DBHCHT																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				41,67	20,94	
Predikat kinerja Program (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	(11 =(9+10))		(14 = (7+13))		(15 = (14/6) x 100%)		-16						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA																						
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tinggi -3,4243		Tinggi -3,353		-		-		0		Tinggi -3,4243		102,11		
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan				2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	%	100		100		100		40		10		50		50		50		
1		401,03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100	6.343.990.638	110	730.211.315	100	638.969.100	40	111.900.474	10	719.970.061	50	831.870.535	50	1.562.081.850	50	24,62	
		.		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	persen	90		25,02		63,33		3,17		7,92		11,09		36,11		40,12		
		401.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	bahan kebijakan	40	1.419.275.732	10	166.298.691	10	159.849.100	4	26.800.950	1	21.018.300	5	47.819.250	15	214.117.941	37,5	15,09	
		401.03.2.02.001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	24	295.205.227	6	55.928.244	6	36.413.400	1	5.635.450	1	6.497.000	2	12.132.450	8	68.060.694	33,33	23,06	
		401.03.2.02.002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	54	1.124.070.505	16	110.370.447	16	123.435.700	3	21.165.500	3	14.521.300	6	35.686.800	22	146.057.247	40,74	12,99	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				37,19	24,62	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggu ng Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(14 = (7+13))		(15 = (14/6) x 100%)		-16		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																			45,06	24,62			
Predikat kinerja Kegiatan (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		401.03 .2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	NiLAI	09-Sep	3.470.00 9.082	8	563.912 .624	6	479.120.0 00	0	85.099.52 4	0	58.398.76 1	0	143.498.2 85	8	707.410 .909	88,89	20,39		
				SKM Layanan UKPBJ	Nilai	BAIK (84,00)		85,99		BAIK (82,5) Nilai		0		0		0		85,99	0	102,37			
		401.03 .2.03.0 001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	320	1.934.76 8.248	40	384.293 .324	80	275.471.4 00	2	51.670.85 0	5	21.415.60 0	7	73.086.45 0	47	457.379 .774	14,69	23,64		
		401.03 .2.03.0 002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	8	213.588. 215	2	46.990. 000	2	59.892.00 0	0	0	0	9.275.000	0	9.275.00	2	53.615. 000	25	2,51		
		401.03 .2.03.0 003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	1200	1.321.65 2.620	300	132.629 .300	300	143.756.6 00	100	33.428.67 4	60	27.708.16 1	160	61.136.83 5	460	193.766 .135	38,33	14,66		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			26,01	20,39			
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																			95,63	20,39			
Predikat kinerja Kegiatan (%)																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Sumber Data aplikasi e-monev (SIPEX) Sudah di non aktifkan dan E-Monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD, sehingga Realisasi Pengadaan dan penganggaran tidak dapat terpantau secara optimal. 2. Terdapat beberapa kali perubahan Perwal tentang APBD sehingga beberapa OPD harus menyesuaikan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP sehingga data paket pengadaan selalu berubah-ubah. 3. Dokumen revisi hasil reviu UKPB lambat dikembalikan oleh OPD.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev. 2. Memberikan batas waktu bagi OPD untuk mengembalikan revisi hasil reviu UKPBJ sesuai SOP. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN. 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Kebijakan pembatasan waktu pengembalian Hasil Revisi Dokumen persiapan pemilihan penyedia oleh Opd sesuai dengan SOP Pengadaan Barjas 2. Memilah dan merekap paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang berkedudukan di UKPBJ sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan pada Rencana Umum Pekerjaan.3. Memproses pekerjaan/paket pengadaan sesuai dengan urutan jadwal yang telah dientry pada SIRUP LKPP.																							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																			45,06	24,62			
Predikat kinerja Program (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN ORGANISASI																						
Tujuan 4: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (90,00)	A (85,55)	A (88,00)	-	-	-	-	-	-	-	A (85,55)		95,06				
Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	niali	A (90,00)	A (85,55)	A (88,00)	-	-	-	-	-	-	-	A (85,55)		95,06				
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	SANGAT BAIK (90)	782.815.421	86,02	224.801.000	88,32	186.997.600	89,14	7.100.000	88,92	6.931.500	88,92	14.031.500	88,92	238.832.500	98,8	30,51	Bagian Organisasi
		401.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	persen	100	410.074.255	100,01	53.211.000	100	35.503.000	100	0	100	3.697.500	100	3.697.500	100	56.908.500	100	13,88	
		401.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	198.355.770	10	15.095.000	10	16.942.500	2	0	0	0	2	0	12	15.095.000	30	7,61	
		401.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	211.718.485	6	38.116.000	6	18.560.500	3,75	0	0,75	3.697.500	4,5	3.697.500	10,5	41.813.500	43,75	19,75	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			36,87	13,88		
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																			100.00	13,88		
Predikat kinerja Kegiatan (%)																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

[illegible]

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab
						K	Rp	K	Rp			K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	
										K	Rp			K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	persen	100	2.555.165.292	80	649.547.974	76,77	426.185.333	80	62.545.284	80	52.646.900	80	115.192.184	80	764.740.158	80	29,93	Bagian Organisasi
		401.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	2.555.165.292	24	649.547.974	24	426.185.333	24	62.545.284	24	52.646.900	24	115.192.184	24	764.740.158	80	29,93	
		401.01.2.13.001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	24	1.051.266.798	6	363.143.864	6	182.005.100	1	13.544.750	2	42.065.925	3	55.610.675	9	418.754.539	37,5	39,83	
		401.01.2.13.003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	12	1.443.898.494	3	279.609.110	3	232.479.900	0,43	46.042.534	0,52	10.580.975	0,95	56.623.509	3,95	336.232.619	32,92	23,29	
		401.01.2.13.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	8	60.000.000	2	6.795.000	2	11.700.333	2	2.958.000	0	0	2	2.958.000	4	9.753.000	50	16,26	
Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik				1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik (87,00)		Baik (85,60)		Baik (85,65)			Baik (87,16)		Baik (87,16)		Baik (87,16)		100,18			
				2. Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Persen	50		-		25		-		-		-		-		-		
Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik				1. Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Persen	100		100		100		30		56,67		56,67		56,67		56,67		
				2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	persen	25		-		25		-		-		-		-		-		

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat at Daerah Penang gung jawab		
						K	Rp	K	Rp			K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp		K	Rp
														K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14		
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	persen	48,28	1.758.164.712	13,33	356.807.571	34,48	267.115.940	30	41.538.019	30	31.295.605	30	72.833.624	30	429.641.195	62,14	24,44	Bagian Organisasi		
		401.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	1.758.164.712	24	356.807.571	24	267.115.940	24	41.538.019	24	31.295.605	24	72.833.624	24	429.641.195	80	24,44			
		401.01.2.13.002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	20	1.652.164.712	5	347.032.571	5	248.560.940	1,42	41.538.019	1,25	31.295.605	2,67	72.833.624	7,67	419.866.195	38,35	25,41			
		401.01.2.13.004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	12	106.000.000	3	9.775.000	3	18.555.000	1,08	0	0,25	0	1,33	0	4,33	9.775.000	36,08	9,22			
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				38,97	27,69			
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				80	27,69			
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Telah disusun proses bisnis perangkat daerah sesuai sistem kerja baru dengan level berjenjang mulai level 0 sampai dengan level 2 (2) masing-masing PD memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Permenpan 88 Tahun 2021 (3) Meningkatnya pemahaman PD terhadap indikator PEKPPP dan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur (4) telah difasilitasi 2 pembinaan ketatalaksanaan yakni monev Sriyadi dan Reviu Proses Bisnis (6) telah dilaksanakan monev pelaksanaan pelayanan publik (reviu SOP, SP) atas OPD sampling penilaian Ombudsman dan PEKPP																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Temuan Umum dan Rekomendasi Tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP yakni upaya pencapaian kinerja belum berdasarkan logical framework dan kerja kolaboratif melalui cross-cutting antar unit kerja serta perlunya komitmen bersama seluruh level pimpinan dan pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP (2) Dari seluruh OPD yang telah menindaklanjuti evaluasi SKM 2023 sebanyak 26 OPD sehingga kurang 4 OPD (3) Lanjutan penyusunan proses bisnis level 3 sampai dengan level aktifitas atau SOP Perangkat Daerah masih akan berlanjut pada tribulan 4 sehingga masih mulai bisa diterapkan tahun 2025																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Hal yang menjadi fokus penting evaluasi tahun 2024 yakni penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi (2) mendorong bagi 4 OPD yang belum menindaklanjuti hasil SKM 2023, agar segera menindaklanjuti atas evaluasi SKM 2023 pada tribulan 3 tahun 2024 (3) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung lanjutan proses bisnis sampai dengan level staf																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya : (1) Pemanfaatan aplikasi SAKIP secara berkesinambungan dan menjadi budaya ASN (2) mendorong OPD tepat waktu menyampaikan laporan SKM per semester serta menindaklanjuti hasil SKM tahun sebelumnya (3) menerapkan proses bisnis secara berkelanjutan																								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																		80,31	23,31					
Predikat kinerja Program (%)																		Tinggi	Sangat Rendah					

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN ORGANISASI																						
Tujuan 4:																						
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)		95,06			
Sasaran:																						
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	niali	A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)		95,06			
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	perse n	SANGAT BAIK (90)	782.815.421	86,02	224.801.000	88,32	186.997.600	89,14	7.100.000	88,92	6.931.500	88,92	14.031.500	88,92	238.832.500	98,8	30,51	Bagian Organisasi
		401.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	perse n	100	410.074.255	100,01	53.211.000	100	35.503.000	100	0	100	3.697.500	100	3.697.500	100	56.908.500	100	13,88	
		401.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	40	198.355.770	10	15.095.000	10	16.942.500	2	0	0	0	2	0	12	15.095.000	30	7,61	
		401.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	24	211.718.485	6	38.116.000	6	18.560.500	3,75	0	0,75	3.697.500	4,5	3.697.500	10,5	41.813.500	43,75	19,75	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				36,87	13,88	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	

[illegible]

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	perse n	100	2.555.165.292	80	649.547.974	76,77	426.185.333	80	62.545.284	80	52.646.900	80	115.192.184	80	764.740.158	80	29,93	Bagian Organisasi
		401.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	2.555.165.292	24	649.547.974	24	426.185.333	24	62.545.284	24	52.646.900	24	115.192.184	24	764.740.158	80	29,93	
		401.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Doku men	24	1.051.266.798	6	363.143.864	6	182.005.100	1	13.544.750	2	42.065.925	3	55.610.675	9	418.754.539	37,5	39,83	
		401.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Doku men	12	1.443.898.494	3	279.609.110	3	232.479.900	0,43	46.042.534	0,52	10.580.975	0,95	56.623.509	3,95	336.232.619	32,92	23,29	
		401.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Doku men	8	60.000.000	2	6.795.000	2	11.700.333	2	2.958.000	0	0	2	2.958.000	4	9.753.000	50	16,26	
Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik				1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik (87,00)		Baik (85,60)		Baik (85,65)			Baik (87,16)		Baik (87,16)		Baik (87,16)		100,18			
				2. Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Perse n	50		-		25		-		-		-		-		-		
Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik				1. Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Perse n	100		100		100		30		56,67		56,67		56,67		56,67		
				2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	perse n	25		-		25		-		-		-		-		-		

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	perse n	48,28	1.758.164.712	13,33	356.807.571	34,48	267.115.940	30	41.538.019	30	31.295.605	30	72.833.624	30	429.641.195	62,14	24,44	Bagian Organisasi
		401.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	1.758.164.712	24	356.807.571	24	267.115.940	24	41.538.019	24	31.295.605	24	72.833.624	24	429.641.195	80	24,44	
		401.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	20	1.652.164.712	5	347.032.571	5	248.560.940	1,42	41.538.019	1,25	31.295.605	2,67	72.833.624	7,67	419.866.195	38,35	25,41	
		401.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	12	106.000.000	3	9.775.000	3	18.555.000	1,08	0	0,25	0	1,33	0	4,33	9.775.000	36,08	9,22	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				38,97	27,69	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				80	27,69	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Telah disusun proses bisnis perangkat daerah sesuai sistem kerja baru dengan level berjenjang mulai level 0 sampai dengan level 2 (2) masing-masing PD memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Permenpan 88 Tahun 2021 (3) Meningkatnya pemahaman PD terhadap indikator PEKPPP dan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur (4) telah difasilitasi 2 pembinaan ketatalaksanaan yakni monev Srikandi dan Reviu Proses Bisnis (6) telah dilaksanakan monev pelaksanaan pelayanan publik (reviu SOP, SP) atas OPD sampling penilaian Ombudsman dan PEKPP																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Temuan Umum dan Rekomendasi Tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP yakni upaya pencapaian kinerja belum berdasarkan logical framework dan kerja kolaboratif melalui cross-cutting antar unit kerja serta perlunya komitmen bersama seluruh level pimpinan dan pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP (2) Dari seluruh OPD yang telah menindaklanjuti evaluasi SKM 2023 sebanyak 26 OPD sehingga kurang 4 OPD (3) Lanjutan penyusunan proses bisnis level 3 sampai dengan level aktifitas atau SOP Perangkat Daerah masih akan berlanjut pada tribulan 4 sehingga masih mulai bisa diterapkan tahun 2025																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Hal yang menjadi fokus penting evaluasi tahun 2024 yakni penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi (2) mendorong bagi 4 OPD yang belum menindaklanjuti hasil SKM 2023, agar segera menindaklanjuti atas evaluasi SKM 2023 pada tribulan 3 tahun 2024 (3) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung lanjutan proses bisnis sampai dengan level staf																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya : (1) Pemanfaatan aplikasi SAKIP secara berkesinambungan dan menjadi budaya ASN (2) mendorong OPD tepat waktu menyampaikan laporan SKM per semester serta menindaklanjuti hasil SKM tahun sebelumnya (3) menerapkan proses bisnis secara berkelanjutan																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				80,31	23,31	
Predikat kinerja Program (%)																				Tinggi	Sangat Rendah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14							
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																							
BAGIAN UMUM																							
Tujuan 3:			1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik (87,00)		Baik (85,60)		Baik (85,65)		Baik (86,97)		Baik (87,16)		Baik (87,16)		Baik (87,16)		100,18				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik																							
Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik			3. Nilai rata-rata SKM Setda	Nilai	Sangat Baik (90,00)		Baik (86,02)		Sangat Baik (88,32)		Sangat Baik (89,14)		Sangat Baik (88,92)		Sangat Baik (88,92)		Sangat Baik (88,92)		98,8				
1		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentua n yang berlaku	persen	100	111.790.0 98.960	100	27.089. 150.369	100	25.120.41 2.842,00	100	4.394.543 .428	100	5.631.708 .033	100	10.026.251. 461,00	100	37.115.40 1.829,58	100	33,2	Bagian Umum	
		401.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	persen	100	73.817.27 0	100	9.309.1 00	100	11.158.30 0,00	0	0	0	0	0	100	9.309.100	100	12,61			
		401.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	73.817.27 0	1	9.309.1 00	1	11.158.30 0,00	0	0	0	0	0	1	9.309.100	25	12,61			
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			25	12,61			
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																			100	12,61			
Predikat kinerja Kegiatan (%)																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
		401.01 .2.03	Administrasi Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	persen	100	37.768.20 9	100	13.742. 900	100	9.450.000	100	0	100	7.155.000 ,00	100	7.155.000	100	20.897.90 0	100	55,33		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14		
		401.01 .2.03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	8	6.400.000	2	7.382.9 00	2	5.210.000	0	0	1	5.035.000	1	5.035.000	3	12.417.90 0	37,5	194,03			
		401.01 .2.03.0 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	26.968.20 9	2	6.360.0 00	2	4.240.000	0	0	1	2.120.000	1	2.120.000	3	8.480.000	37,5	31,44			
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																					37.50	55,33		
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																					Sangat Rendah	Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																					100	55,33		
Predikat kinerja Kegiatan (%)																					Sangat Tinggi	Rendah		
		401.01 .2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	persen	100	6.742.052	100	1.590.0 00	100	1.060.000	0	0	0	0	0	0	100	1.590.000	100	23,58			
		401.01 .2.04.0 007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokum en	4	6.742.052	1	1.590.0 00	1	1.060.000	0	0	0	0	0	0	1	1.590.000	25	23,58			
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																					25	23,58		
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																					100	23,58		
Predikat kinerja Kegiatan (%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		401.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	persen	100	374.484.4 21	100	486.909 .000	100	69.410.20 0		72.150.00 0	0	0	100	72.150.000	100						
		401.01 .2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	210	259.644.4 21	26	295.909 .000	1	69.410.20 0		72.150.00 0	0	0	1	72.150.000	27						
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																					12,86	141,61		
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																					Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																					100	149,29		
Predikat kinerja Kegiatan (%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14		
		401.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen	100	13.411.79 2.887	100	4.117.7 25.935	100	4.187.398 .000		808.278.3 29	100	927.739.2 51	100	1.736.017.5 80	100						
		401.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.460.603	1	600.000	1	437.000		0	1	437.000	1	437.000	2						
		401.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	192	4.847.559 .959	48	1.024.1 79.719	48	1.029.257 .000		294.486.1 74	12	161.974.2 12	24	456.460.386	72						
		401.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	335.113.2 14	6	29.667. 273	6	30.600.00 0		29.914.50 0	0	0	6	29.914.500	12						
		401.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	8.226.659 .111	13	3.063.2 78.943	13	3.127.104 .000		483.877.6 55	4	765.328.0 39	7	1.249.205.6 94	20						
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				43,99	43,65			
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	43,65			
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
		401.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	persen	100	5.787.838 .427	100	1.240.7 91.700	100	1.456.487 .100		183.769.3 50	100	134.925.0 13,00	100	318.694.363	100						
		401.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	41.010.05 0	2	9.306.6 00	2	455.630.1 00		95.485.55 0	2	29.482.61 3	2	124.968.163	4						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14		
		401.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	260	1.109.231 .885	65	277.382 .500	65	503.228.0 00	88.283.80 0	11	85.938.30 0	26	174.222.100	91							
		401.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	300.000.000	40	306.326 .600	118	237.929.0 00	0	6	19.504.10 0	6	19.504.100	46							
		401.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitas	Unit	16	2.990.233 .592	4	413.936 .000	4	259.700.0 00	0	0	0	0	0	4							
		401.01 .2.09.0 011	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitas	Unit	160	1.072.362 .900	2	203.840 .000	10	0	0	0	0	0	0	2							
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																								
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																								
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																								
Predikat kinerja Kegiatan (%)																								
		401.01 .2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrtasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	3.815.010 .820	100	909.761 .600	100	923.716.3 14	226.351.6 77	100	182.527.1 79	100	408.878.856	100							
		401.01 .2.11.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/ bulan	8	733.884.3 36	2	170.989 .000	2	178.952.3 14	24.521.67 7	2	36.219.70 4	2	60.741.381	4							
		401.01 .2.11.0 002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Paket	92		23	138.772 .600	23	138.764.0 00	31.830.00 0	4	26.307.47 5	8	58.137.475	31							

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab		
						K	Rp	K	Rp			K	Rp	I									II	
														K	Rp								K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14		
			dan Wakil Kepala Daerah	Daerah yang Disediakan																				
		401.01 .2.11.0 003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8	24.606.0 30	2	6.000.0 00	2	6.000.000		0		0		0		0	2				
		401.01 .2.11.0 004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	8		2	600.000 .000	2	600.000.0 00		170.000.0 00		2	120.000.0 00	2	290.000.000	4					
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																								
Predikat kinerja(%)																								
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																								
Predikat kinerja Kegiatan (%)																								
		401.01 .2.12	Fasilitasi Kerumahtangga n Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtangaa n Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	persen	100	16.692.99 3.257	100	4.523.5 39.447	100	3.087.322 .900		600.811.4 43	100	650.472.1 96	100	1.251.283.6 39	100						
		401.01 .2.12.0 001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	16	8.466.849 .643	4	2.104.7 34.595	4	1.456.623 .800,00		266.157.0 67	2	336.646.7 69	4	602.803.836	8						
		401.01 .2.12.0 002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	16	6.031.302 .957	4	1.782.9 53.002	4	1.334.617 .200		306.499.3 76	2	249.968.5 27	4	556.467.903	8						
		401.01 .2.12.0 003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	48	2.194.840 .657	12	635.851 .850	12	296.081.9 00,00		28.155.00 0,00	3	63.856.90 0,00	6	92.011.900, 00	18						
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																								
Predikat kinerja(%)																								
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14		
Predikat kinerja Kegiatan (%)																							
		401.01 .2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	persen	80	9.182.028 .620	80	2.279.2 61.600	80	1.639.220 .200		71.201.00 0	80	547.904.6 00	80	619.105.600	80					
		401.01 .2.14.0 001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	132	8.241.250 .856	31	1.909.2 97.600	33	1.421.862 .900		48.566.00 0	11	495.508.1 00	18	544.074.100	49					
		401.01 .2.14.0 002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1600	472.933.6 39	439	132.900 .000	400	63.384.00 0		0	88	0	168	0	607					
		401.01 .2.14.0 003	Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Laporan	12220	467.844.1 25	2.624	237.064 .000	3055	153.973.3 00		22.635.00 0	700	52.396.50 0	1.456	75.031.500	4080					
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																							
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																							
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																							
Predikat kinerja Kegiatan (%)																							
Tujuan 4:					Nilai														95,06				
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)					
Sasaran:					niali														95,06				
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)					
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	SANGAT BAIK (90)	48.439.95 1.936	86	13.506. 519.087	88,32	13.735.18 9.828	89,14	2.431.981 .629	87,34	3.180.984 .794	87,34	5.612.966.4 23	87,34	19.119.48 5.510	97,04	39,47	Bagian Umum	
		401.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen	100	41.600.29 2.089	100	11.566. 606.506	100	12.390.69 2.028	100	2.181.704 .201	100	2.711.884 .235	100	4.893.588.4 36	100	16.460.19 4.942	100	39,57		

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14		
		401.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	336	41.555.44 3.909	84	11.555. 962.506	84	12.381.34 7.028	84	2.181.704 .201	84	2.707.684 .235	84	4.889.388.4 36	168	16.445.35 0.942	50	39,57			
		401.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Laporan	16	44.848.18 1	4	10.644. 000	4	9.345.000	1	0	1	4.200.000	2	4.200.000	6	14.844.00 0	37,5	33,1			
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				43,75	39,57			
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	39,57			
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
		401.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen	100	6.839.659 .847	100	1.939.9 12.581	100	1.344.497 .800	100	250.277.4 28	100	469.100.5 59	100	719.377.987	100	2.659.290 .568	100	38,88			
		401.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	326.158.6 70	1	104.756 .399	1	73.986.10 0	1	22.741.60 0	1	25.020.10 0	1	47.761.700	2	152.518.0 99	50	46,76			
		401.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	28	978.120.0 42	7	279.755 .100	7	151.706.5 00	2	39.552.00 0	1	67.031.50 0	3	106.583.500	10	386.338.6 00	35,71	39,5			
		401.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	130.377.1 01	3	39.623. 850	3	40.479.50 0	0	0	1	22.457.50 0	1	22.457.500	4	62.081.35 0	33,33	47,62			
		401.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	680	2.159.099 .988	177	726.307 .000	170	552.096.4 00	14	66.662.50 0	28	197.474.4 00	42	264.136.900	219	990.443.9 00	32,21	47,62			

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangk at Daerah Penang gung jawab		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14		
		401.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	318.450.8 31	2	82.550. 600	2	74.642.30 0	1	32.700.00 0	2	52.202.17 5	2	84.902.175	4	167.452.7 75	50	52,58			
		401.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokum en	96	194.387.6 37	24	64.800. 000	24	43.650.00 0	6	10.800.00 0	6	10.800.00 0	12	21.600.000	36	86.400.00 0	37,5	44,45			
		401.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	520	2.733.065 .577	134	642.119 .632	130	407.937.0 00	26	77.821.32 8	195	94.114.88 4	221	171.936.212	355	814.055.8 44	68,27	29,79			
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				43,86	38,88			
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	38,88			
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Komitmen personil pelaksana yang sangat baik dalam pencapaian kinerja (2) pelaksanaan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai dengan standar (3) pemberian Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) belum terintegrasinya manajemen data di internal Setda (2) belum termanfaatkannya sukma-e jatim secara maksimal oleh pengguna layanan (3) kegiatan pimpinan daerah yang melibatkan pihak eksternal yang sifatnya tidak terjadwalkan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) sosialisasi lebih intensif kepada pengguna layanan untuk menggunakan sukma-e jatim sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan (2) koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait (3) optimalisasi penataan agenda pimpinan sehingga bisa mengakomodir seluruh kegiatan PD																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) meningkatkan kapasitas SDM pelayanan, arsiparis, pengurus barang, pejabat pengelola keuangan secara rutin (2) mengintegrasikan sistem manajemen data di internal Setda (3) meningkatkan kualitas pelayanan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan Pengaduan online																								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				98,52	31,57			
Predikat kinerja Program (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Dari total 4 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2024, rata-rata capaian kinerja program seluruh Bagian sampai dengan tribulan II adalah 60,64%. Dimana pencapaian rata-rata program pada masing-masing bagian tergambar dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan

Mengampu 2 (dua) Program yakni Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 71,43%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (2) komitmen personil perangkat kelurahan dalam memahami tugas yang baru
- Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) minimnya akses data yang diperoleh untuk mengisi profil kelurahan (2) tidak lolosnya lomba kelurahan ke tahap selanjutnya sehingga penyerapan anggaran kinerja rendah

Sehingga pada tribulan selanjutnya atau pada tribulan III tahun 2024 perlu dilakukan upaya – upaya antara lain :

- (1) meningkatkan koordinasi dengan OPD pemilik data
- (2) mengevaluasi data dokumen lomba kelurahan yang dikirimkan ke provinsi sebagai bahan masukan pelaksanaan lomba tahun berikutnya

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan OPD terkait urusan kewilayahan (2) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan OPD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja
- Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) ketidaksinkronan usulan pembangunan oleh masyarakat dengan juklak dan juknis program RT Keren (2) adanya kegiatan Tuan Rumah BBGRM di Kota Blitar sehingga fokus ke kegiatan tersebut mengakibatkan kegiatan lainnya ditunda untuk tribulan berikutnya (3) adanya indikator baru di urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di penginputan SPM tribulan 2

Sehingga perlu upaya-upaya perbaikan guna mencapai target tahun 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) melakukan rakor kembali antara pihak kelurahan dengan masyarakat pengusul pembangunan wilayah
- (2) memfokuskan kembali pencapaian indikator pembinaan lembaga kemasyarakatan pasca pelaksanaan BBGRM
- (3) Bagian Pemerintahan lebih aktif dalam mendampingi penginputan data pada urusan yang diampu

2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Mengampu 2 (dua) Program yakni Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan

dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 54,17%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah koordinasi yang baik dengan perangkat daerah maupun lintas sektor
- Faktor penghambat pencapaian kinerja yakni kurangnya pemahaman stakeholder sasaran fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Sehingga perlu upaya-upaya perbaikan guna mencapai target selama tahun 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Melaksanakan sosialisasi lebih intensif kepada sasaran/stakeholder terkait penerima layanan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar)
 - (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana
 - (3) Koordinasi yang baik dengan lintas OPD dan lintas sektor anggota TPID Kota Blitar
 - (4) Tersusunnya dokumen indentifikasi sumberdaya air yang bermanfaat untuk pemetaan SDA, rujukan pengambilan keputusan dan manajemen pelayanan
 - (5) Koordinasi yang baik dengan lintas sektor, terutama SDA Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Bea Cukai Blitar
- Faktor penghambat pencapaian kinerja: belum terlaksananya identifikasi data sumber air tanah atau air sumur dalam dan jaringan distribusi layanan air bersih atau perpipaan di Kota Blitar
 - (1) Perlambatan reformasi struktural dan kultural oleh internal terutama di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar
 - (2) Tantangan dis-sinergitas internal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang perlu dilakukan revitalisasi pasca restrukturisasi
 - (3) Belum teridentifikasi secara terstruktur (NIB/Nomor Induk Berusaha) dari UKM, IKM dan Ekraf binaan Perangkat Daerah
 - (4) Belum terdapat regulasi yang menjadi pedoman pengembangan UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar
 - (5) Belum optimalnya pelaksanaan rencana kerja strategi 4 K TPID
 - (6) Belum terlembaganya Bank Kota Blitar sebagai program unggulan keuangan inklusif daerah
 - (7) Belum ada komitmen tertulis tentang rencana aksi antara Satpol PP dengan Bea Cukai Blitar terkait teknis kegiatan sub penegakan hukum (pemberantasan Rokok Ilegal) dan perlu dukungan Perangkat daerah terkait lainnya untuk pencapaian program yang dibiayai DBHCHT

Sehingga pada tribulan selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah percepatan dalam:

- (1) Pembinaan terkait pengelolaan dan manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, mengingat Perlambatan reformasi struktural dan kultural internal
- (2) Melaksanakan tahapan rekrutmen Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat untuk
- (3) Koordinasi dengan Perangkat daerah terkait pendataan UKM, IKM dan Ekraf binaan Perangkat Daerah yang mempunyai NIB
- (5) Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja strategi 4 K TPID melalui koordinasi intensif sekretariat TPID
- (6) Pelembagaan Bank Kota Blitar sebagai program unggulan keuangan inklusif daerah melalui review perkreditan dan perbankan daerah dan rencana aksi TPKAD
- (7) Koordinasi lebih baik antara Satpol PP dengan Bea Cukai Blitar guna penyusunan rencana aksi

3. Bagian Hukum

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian kinerja program sebesar 28,57%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) komitmen personil pelaksana yang sangat baik
 - (2) adanya penambahan personil dalam pelaksanaan pencapaian kinerja organisasi
 - (3) koordinasi yang dilaksanakan secara rutin dengan stakeholder terkait
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) dinamisnya peraturan perundangan yang menuntut percepatan harmonisasi produk hukum daerah
 - (2) adanya perubahan regulasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses pengajuan produk hukum (Perda dan Perkada) membutuhkan waktu yang cukup lama

Sehingga guna mencapai target 2024 maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- (1) melaksanakan penjadwalan ulang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan
- (2) melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses penyusunan Perda

4. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian kinerja program sebesar 30,55%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- (2) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan
 - Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) Sumber Data aplikasi e-monev (SIPEX) Sudah di non aktifkan dan E-Monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD, sehingga Realisasi Pengadaan dan penganggaran tidak dapat terpantau secara optimal
 - (2) Terdapat beberapa kali perubahan Perwal tentang APBD sehingga beberapa OPD harus menyesuaikan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP sehingga data paket pengadaan selalu berubah-ubah
 - (3) Dokumen revisi hasil reuiu UKPB lambat dikembalikan oleh OPD
- Sehingga membutuhkan langkah-langkah perbaikan :
- (1) Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev.
 - (2) Memberikan batas waktu bagi OPD untuk mengembalikan revisi hasil reuiu UKPBJ sesuai SOP
 - (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN.
 - (4) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan.

5. Bagian Organisasi

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja program sebesar 80%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) telah disusun proses bisnis perangkat daerah sesuai sistem kerja baru dengan level berjenjang mulai level 0 sampai dengan level 2
 - (2) masing-masing PD memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Permenpan 88 Tahun 2021
 - (3) meningkatnya pemahaman PD terhadap indikator PEKPPP dan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur
 - (4) telah difasilitasi 2 pembinaan ketatalaksanaan yakni monev Srikandi dan Reviu Proses Bisnis
 - (6) telah dilaksanakan monev pelaksanaan pelayanan publik (reviu SOP, SP) atas OPD sampling penilaian Ombudsman dan PEKPP
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) temuan Umum dan Rekomendasi Tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP yakni upaya pencapaian kinerja belum berdasarkan *logical framework* dan kerja kolaboratif melalui cross-cutting antar unit kerja serta perlunya komitmen bersama seluruh level pimpinan dan pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP
 - (2) dari seluruh OPD yang telah menindaklanjuti evaluasi SKM 2023 sebanyak 26 OPD sehingga kurang 4 OPD

- (3) lanjutan penyusunan proses bisnis level 3 sampai dengan level aktifitas atau SOP Perangkat Daerah masih akan berlanjut pada tribulan 4 sehingga mulai bisa diterapkan tahun 2025

Sehingga pada tribulan III tahun 2024 perlu dilakukan strategi percepatan pencapaian target yakni melalui :

- (1) hal yang menjadi fokus penting evaluasi tahun 2024 yakni penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi
- (2) mendorong bagi 4 OPD yang belum menindaklanjuti hasil SKM 2023, agar segera menindaklanjuti atas evaluasi SKM 2023 pada tribulan 3 tahun 2024
- (3) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung lanjutan proses bisnis sampai dengan level aktifitas atau staf

6. Bagian Umum

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja program sebesar 100,34%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - (1) komitmen personil pelaksana yang sangat baik dalam pencapaian kinerja
 - (2) pelaksanaan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai dengan standar
 - (3) pemberian layanan kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - (1) belum terintegrasinya manajemen data di internal Setda
 - (2) belum termanfaatkannya Sukma-e Jatim secara maksimal oleh pengguna layanan
 - (3) kegiatan pimpinan daerah yang melibatkan pihak eksternal yang sifatnya tidak terjadwalkan

Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya:

- (1) sosialisasi lebih intensif kepada pengguna layanan untuk menggunakan Sukma-e Jatim sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan
- (2) koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait
- (3) optimalisasi penataan agenda pimpinan sehingga bisa mengakomodir seluruh kegiatan PD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana kerja dan pendanaan dengan memakai kaidah dan indikator yang spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan serta fleksibel terhadap perubahan.

Tahun 2024 adalah tahun Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan didukung Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi dengan tema: **“Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah”**. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024: Memantapkan Pembangunan Jawa Timur yang adil, sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang partisipatoris, Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Pada tahun ini, arah kebijakan Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur sama-sama menekankan pada perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut, menyesuaikan hasil monitoring evaluasi pencapaian kinerja sampai dengan tribulan II tahun 2024, serta menindaklanjuti rekomendasi atas capaian kinerja tahun 2023 pada dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah maka perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 yang diturunkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, penyebaran lokasi, sumber dan kebutuhan dana/pagu indikatif dapat dijelaskan pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2024

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
	TUJUAN:					
I	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator: 1) Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2) Kesetaraan Kesetaraaan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3) Kerjasama	83,85	85,155	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian IKUB 2023 sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 85,15

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
			Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4) Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya			
	SASARAN:					
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	
	TUJUAN:					
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	BB (74,00)	BB (74,795)	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Nilai SAKIP 2023 sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 74,79

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
		Persentase Kepala PD yang paham atas penerapan “ <i>Good Governance</i> ”	“ <i>Good governance</i> ” atau tata kelola yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara	33,33%	33,33%	
	SASARAN:					
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	76,77%	80,00%	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 80,00%
	TUJUAN:					
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan	Sangat Tinggi (3,3534)	Tinggi (3,4243)	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Status EKPPD 2023 sudah melampaui

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			target awal tahun 2024 sebesar 3,4243
	SASARAN:					
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	
	TUJUAN:					
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan	Baik (85,00)	Baik (85,65)	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 85,60

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
		Persentase PD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung	25%	25%	
	SASARAN:					
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Hasil analisa Survey Kepuasan Masyarakat perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan)	34,48%	100%	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 100%
		Nilai rata - rata SKM Setda	Nilai rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat atau IKM terhadap kualitas layanan Sekretariat Daerah	Sangat Baik (88,32)	Sangat Baik (88,32)	
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.	25%	25%	

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
			Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.			
	TUJUAN:					
IV	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (88)	A (88)	
	SASARAN:					
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (88)	A (88)	

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan koordinasi serta penyamaan persepsi antar lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, melalui: ✓ Rapat Koordinasi ✓ Kegiatan Lintas Sektor	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan asistensi usulan rencana kegiatan RT Keren oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Melakukan penyesuaian atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Melakukan percepatan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah melalui:	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		• Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah anggota TPID / TPAKD dan Satgas Pangan • Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan antar Perangkat Daerah dan Sinergitas Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah	- Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. Dan Perikanan
		Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui: • Rebranding Tata Kelola BUMD • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui: • Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan Economy Branding Kota Blitar • Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/ Ekraf Kota Blitar	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi	Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal tanggal 31 Januari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	pembangunan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah		
		Melaksanakan bimtek dan pendampingan / desk penyusunan RUP kepada OPD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Monitoring kepada OPD terkait pelaksanaan belanja PBJ pada katalog lokal serta membuka akses seluas-luasnya bagi penyedia yang ingin menayangkan produknya pada katalog lokal	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Terkait kebijakan P3DN, Tim P3DN Pemerintah Kota Blitar harus mengintensifkan rapat koordinasi untuk mendudukkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Melaksanakan bimtek pengadaan barang dan jasa kepada jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan pelaku pengadaan lainnya baik daring maupun luring	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas realisasi pengadaan barang dan jasa yang dicatatkan pada LPSE	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas kepatuhan OPD dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Mengintensifkan rapat koordinasi Tim TEPPRA untuk melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan guna menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi	- Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik	- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Mengikutsertakan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan PPKom dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	Melaksanakan percepatan internalisasi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis	

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis	
		Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun	
		Standar sarana prasarana pendukung layanan dimasukkan dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sehingga seluruh OPD menganggarkan untuk perbaikan layanan	
6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik internal Perangkat Daerah	Menyusun manajemen data yang lebih tertib	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan - Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Menyusun standar pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Melakukan optimalisasi dan perencanaan kebutuhan dengan lebih tepat sasaran selama tahun berkenaan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Optimalisasi kegiatan di awal tahun atau disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Perbaikan dari unsur persyaratan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Hukum	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Umum	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Perbaikan dari unsur peningkatan kompetensi pelaksana dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Pemerintahan	- Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
7	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						BAGIAN PEMERINTAHAN						
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	71,43 persen	91,00 persen	108.146.500	21.302.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 86.844.500 dialihkan pada rangkaian kegiatan fasilitasi BBGRM ke-XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan)
2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	19 kelurahan	21 kelurahan	108.146.500	21.302.000	
2	13	04	2	01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 dokumen	21 dokumen	108.146.500	21.302.000	
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen			
							Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							<i>Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi</i>	100 persen	100 persen			
							<i>Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi</i>	100 persen	100 persen			
							<i>Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan</i>	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	5 dokumen	5 dokumen	643.624.958	1.030.467.258	Anggaran bertambah sebesar Rp. 386.842.300 untuk fasilitasi rangkaian kegiatan BBGRM ke-XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta untuk fasilitasi evaluasi Program RT Keren Tahun 2024
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat</i>	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							bidang keagamaan yang ditindaklanjuti					
4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan			
							Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan			
							Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan			
4	01	02	2	02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 dokumen	39 dokumen	8.531.039.500	8.966.038.296	Anggaran hibah bertambah sebesar Rp. 434.998.796 untuk pembangunan 14 lembaga dan atau tempat ibadah
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti</i>	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan			
4	01	03	2	01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	2 dokumen	2 dokumen	219.376.000	234.329.900	Anggaran bertambah sebesar Rp. 14.953.900 diperuntukkan kegiatan Pansel Pimpinan BUMD
4	01	03	2	01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>	4 dokumen	4 dokumen	191.954.200	176.954.200	Anggaran berkurang sebesar Rp. 15.000.000 digeser pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
						BAGIAN HUKUM						
4	01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi</i>	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana</i>	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>	320 dokumen	320 dokumen	312.338.600	340.291.000	Anggaran bertambah sebesar Rp. 27.952.400

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												untuk penguatan IRH dan IKK
4	01	02	2	03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	4 kasus	4 kasus	271.810.700	222.789.400	Anggaran berkurang sebesar Rp. 49.021.300 dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4	01	02	2	03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>	70 dokumen	70 dokumen	180.990.600	202.059.500	Anggaran bertambah sebesar Rp. 21.068.900 untuk penguatan salah satu komponen penilaian pengelolaan JDIH
						BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA						
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti</i>	100 persen	100 persen			
4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan</i>	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							<i>Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti</i>	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan			
4	01	03	2	02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	16 laporan	16 laporan	123.435.700	118.928.100	Anggaran berkurang sebesar Rp. 4.507.600 digeser pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik
4	01	03	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>SKM Layanan UKPBJ</i>	BAIK (82,5) Nilai	BAIK (82,5) Nilai			
							<i>Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan</i>	100 persen	100 persen			
							<i>Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)</i>	6 Nilai	6 Nilai			
4	01	03	2	03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	80 dokumen	80 dokumen	260.471.400	264.836.000	Anggaran bertambah sebesar Rp. 4.364.600 diperuntukkan biaya klarifikasi Penyedia yang bertempat di luar kota

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	03	2	03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	2 dokumen	2 dokumen	59.892.000	98.585.000	Anggaran bertambah sebesar Rp. 38.693.000 diperuntukkan pembelian PC bagi tenaga P3K PPBJ
4	01	03	2	03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	300 orang	300 orang	138.756.600	100.206.600	Anggaran berkurang sebesar Rp. 38.550.000 digeser pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik
						BAGIAN ORGANISASI						
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	SANGAT BAIK (88,32) Nilai	SANGAT BAIK (88,32) Nilai			
							<i>Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik</i>	34,48 persen	34,48 persen			
							<i>Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi</i>	75,86 persen	80,00 persen			
4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu</i>	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10.119.000	8.874.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 1.245.000 guna efisiensi dan dialihkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB sebagai upaya pencapaian target IKU Kota
4	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyus Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	5.153.600	4.535.600	Anggaran berkurang sebesar Rp. 618.000 guna efisiensi dan dialihkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB sebagai upaya pencapaian target IKU Kota
4	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	6 paket	65.932.000	34.332.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 31.600.000 guna efisiensi dan diperuntukkan untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab sebagai upaya pencapaian target tujuan RPJMD atau IRB

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 orang	84 orang	85.530.600	83.023.600	Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.507.000 guna efisiensi dan diperuntukkan untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab sebagai upaya pencapaian target tujuan RPJMD atau IRB
4	01	01	2	13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	24 OPD	24 OPD			
4	01	01	2	13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 dokumen	6 dokumen	172.976.300	250.466.600	Anggaran bertambah sebesar Rp. 77.490.300 diperuntukkan Penyusunan Proses Bisnis Level 2 Sampai Level 4 dan Identifikasi SOP di 30 Perangkat Daerah Kota Blitar Pasca Penerapan Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) serta penguatan pencapaian target IRB
4	01	01	2	13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 laporan	5 laporan	248.642.540	242.699.710	Anggaran berkurang sebesar Rp. 5.942.830 guna efisiensi atau penyesuaian agenda Pemerintah Pusat dan Provinsi dan dialihkan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB sebagai upaya pencapaian target IKU Kota
4	01	01	2	13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen	3 dokumen	221.689.500	210.927.200	Anggaran berkurang sebesar Rp. 25.000.000 pada aplikasi Kereta dialihkan ke Diskominfotik guna update aplikasi SAKIP, dan bertambah sebesar Rp. 14.237.700 sebagai upaya penguatan peneraoan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
4	01	01	2	13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 dokumen	2 dokumen	11.700.333	11.885.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 184.667 guna efisiensi dan dialihkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB sebagai upaya pencapaian target IKU Kota
						BAGIAN UMUM						
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							standar/ketentuan yang berlaku					
4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	11.158.300,00	11.158.200,00	Anggaran berkurang Rp. 100
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 orang/bulan	84 orang/bulan	12.540.692.028	12.871.347.028	Anggaran bertambah sebesar Rp. 330.655.000 untuk mencukupi kekurangan gaji karena perubahan kebijakan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 ASN
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	48 laporan	1.049.261.700	903.094.424	Anggaran berkurang sebesar Rp. 146.167.276 guna penyesuaian kebijakan pembayaran Telepon, Air dan Listrik
4	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	13 laporan	3.258.306.000	2.953.501.236	Anggaran berkurang sebesar Rp. 304.804.764 guna penyesuaian kebijakan pemberian gaji TAD/THL
4	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	455.630.100	416.824.600	Anggaran berkurang Rp. 38.805.500 menyesuaikan dengan kebutuhan
4	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 unit	65 unit	503.228.000	594.076.500	Anggaran berkurang Rp. 90.848.500 menyesuaikan dengan kebutuhan
4	01	01	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 paket	12 paket	296.081.900	245.249.900	Anggaran berkurang Rp. 50.832.000 menyesuaikan dengan kebutuhan
4	01	01	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 persen	80 persen			
4	01	01	2	14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 laporan	33 laporan	1.459.152.300	1.558.296.900	Anggaran bertambah sebesar Rp. 99.144.600 diperuntukkan untuk sewa peralatan umum dan jasa artis pada event penyambutan tahun baru 2025
4	01	01	2	14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 laporan	400 laporan	77.384.000	63.050.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 14.334.000 menyesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 3.4

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN PEMERINTAHAN				5.520.556.258,00	1.821.570.658,00	2.121.568.458,00						2.555.555.870		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				120.646.500,00	108.146.500,00	21.302.000,00						196.636.270		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				120.646.500,00	108.146.500,00	21.302.000,00						196.636.270		
1	2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	71,43 persen	91,00 persen	120.646.500,00	108.146.500,00	21.302.000,00						91,50%	196.636.270	
	2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	19 kelurahan	21 kelurahan	120.646.500,00	108.146.500,00	21.302.000,00			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kelurahan yang ada di Kota Blitar	21 kelurahan	196.636.270	BAGIAN PEMERINTAHAN
	2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	21 Dokumen	120.646.500,00	108.146.500,00	21.302.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kelurahan yang ada di Kota Blitar	21 Dokumen	196.636.270	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				5.399.909.758,00	1.713.424.158,00	2.100.266.458,00						2.358.919.600		
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH				5.399.909.758,00	1.713.424.158,00	2.100.266.458,00						2.358.919.600		
2	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan	100 persen	100 persen	5.399.909.758,00	1.713.424.158,00	2.100.266.458,00						100%	2.358.919.600	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	1.915.110.558,00	643.624.958,00	1.030.467.258,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha n Daerah, Administrasi Kewilayahan , Kualitas Otoda	5 Dokumen	858.664.700	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	154.693.500,00	154.693.500,00	154.693.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha n Daerah, Administrasi Kewilayahan , Kualitas Otoda	4 Dokumen	704.007.300	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 persen	83,33 persen	3.077.311.500,00	662.311.500,00	662.311.500,00		Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lem baga/Instans i Lain	83,33%	233.608.700	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	8 Dokumen	3.077.311.500,00	662.311.500,00	662.311.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lem baga/Instans i Lain	8 Dokumen	233.608.700	BAGIAN PEMERINTAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BAGIAN HUKUM				660.140.200	765.139.900	765.139.900						660.139.700		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				660.140.200	765.139.900	765.139.900						660.139.700		
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH				660.140.200	765.139.900	765.139.900						660.139.700		
1	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	100 persen	100 persen	660.140.200	765.139.900	765.139.900						100%	660.139.700	
	4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 persen	100 persen	660.140.200	765.139.900	765.139.900			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	100%	660.139.700	BAGIAN HUKUM
	4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	320 Dokumen	207.338.900	312.338.600	340.291.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	320 Dokumen	221.168.200	BAGIAN HUKUM
	4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum														
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	4 Kasus	271.810.700	271.810.700	222.789.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	4 Kasus	190.013.500	BAGIAN HUKUM
	4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	70 Dokumen	70 Dokumen	180.990.600	180.990.600	202.059.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis	Perangkat Daerah	70 Dokumen	248.958.000	BAGIAN HUKUM

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Hukum yang Didokumentasi										Teknologi Informasi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				9.636.034.562	9.647.673.520	10.082.626.216						10.014.621.767		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				9.636.034.562	9.647.673.520	10.082.626.216						10.014.621.767		
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH				9.636.034.562	9.647.673.520	10.082.626.216						10.014.621.767		
1	4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	8.781.778.500	8.749.278.500	9.184.277.296						100%	9.196.827.200	
							Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen											
	4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 rumusan	6 rumusan	8.781.778.500	8.749.278.500	9.184.277.296			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarak at Kota Blitar	6 rumusan kebijakan	9.196.827.200	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti		4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan												
	4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	39 Dokumen	8.563.539.500	8.531.039.500	8.966.038.296	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis	Masyarak at Kota Blitar	25	8.979.252.900	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Dana Transfer								Dokumen						

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Umum- Dana Alokasi Umum		Teknologi Informasi				
	4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial															
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	114.023.300	114.023.300	114.023.300	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarak at Kota Blitar	2 Dokumen	122.240.900	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	2 Dokumen	104.215.700	104.215.700	104.215.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarak at Kota Blitar	2 Dokumen	95.333.400	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	854.256.062	898.395.020	898.348.920						100%	817.794.567				
		4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	651.438.400	631.438.400	631.392.300		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perusaha an Daerah dan Sektor Perekono mian di Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	617.794.567	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	234.376.000	219.376.000	234.329.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perusaha an Daerah dan Sektor Perekono mian di Kota Blitar	2 Dokumen	215.867.767	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	220.108.200	220.108.200	220.108.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perusaha an Daerah dan Sektor Perekono mian di Kota Blitar	2 Laporan	218.140.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																
								Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	196.954.200	191.954.200	176.954.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Perusaha an Daerah dan Sektor Perekono	4 Dokumen	183.786.800	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN UMUM				25.120.412.842	26.170.548.770	26.145.598.230						26.169.538.541		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				25.120.412.842	26.170.548.770	26.145.598.230						26.169.538.541		
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH				25.120.412.842	26.170.548.770	26.145.598.230						26.169.538.541		
1	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku	100 persen	100 persen	25.120.412.842	26.170.548.770	26.145.598.230						100%	26.169.538.541	
							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGAT BAIK (88,32) Nilai	SANGAT BAIK (88,32) Nilai									SANGAT BAIK (89) Nilai		
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen	100 persen	11.158.300	11.158.300	11.158.300			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar	100%	1.100.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.158.300	11.158.300	11.158.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar	1 Laporan	1.100.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	12.390.692.028	12.540.692.028	12.880.692.028			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.299.748.327	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	12.381.347.028	12.531.347.028	12.871.347.028	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84 Orang/ bulan	14.295.898.327	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	9.345.000	9.345.000	9.345.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	3.850.000	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 persen	100 persen	9.450.000	9.450.000	9.450.000			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.950.000	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.210.000	5.210.000	5.210.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.750.000	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.240.000	4.240.000	4.240.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	2.200.000	BAGIAN UMUM	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.479.500	40.479.500	40.479.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	3 Paket	31.781.900	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	170 Paket	552.096.400	818.806.400	818.806.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	170 Paket	773.355.000	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	74.642.300	74.643.900	74.643.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	2 Paket	43.698.700	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	43.650.000	64.800.000	64.800.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	24 Dokumen	48.600.000	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	407.937.000	407.937.000	407.937.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	130 Laporan	382.721.700	BAGIAN UMUM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	69.410.200	90.239.428	90.239.428			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	22.205.800	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	69.410.200	90.239.428	90.239.428	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Unit	22.205.800	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen	100 persen	4.187.398.000	4.338.604.700	3.887.632.660			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	100%	4.068.456.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	437.000	437.000	437.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	1 Laporan	441.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	1.029.257.000	1.049.261.700	903.094.424	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah	48 Laporan	864.885.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	30.600.000	30.600.000	30.600.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintah n daerah	6 Laporan	12.000.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	3.127.104.000	3.258.306.000	2.953.501.236	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintah n daerah	13 Laporan	3.191.130.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 persen	100 persen	1.456.487.100	1.646.655.100	1.698.698.100			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pemeliharaa n Barang Mlik Daerah	100%	1.461.992.800	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	455.630.100	455.630.100	416.824.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Unit	455.618.700	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	65 Unit	503.228.000	503.228.000	594.076.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65 Unit	495.752.600	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 Unit	118 Unit	237.929.000	237.929.000	237.929.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	118 Unit	163.157.500	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	4 Unit	4 Unit	259.700.000	449.868.000	449.868.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Unit	347.464.000	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	100 persen	923.716.314	923.716.314	923.716.314			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	100%	923.673.914	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	178.952.314	178.952.314	178.952.314	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	2 Orang/ Bulan	178.952.314	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	138.764.000	138.764.000	138.764.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	23 Paket	138.721.600	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	2 Orang	6.000.000	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	2 Orang/ Bulan	600.000.000	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	3.087.322.900	3.193.549.400	3.142.717.400			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerumahtn ggaan Sekretariat Daerah	100%	3.093.126.500	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah															
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.456.623.800	1.564.818.400	1.564.818.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerumahtn ggaan Sekretariat Daerah	4 Paket	1.514.704.900	BAGIAN UMUM	
	4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah															
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.334.617.200	1.332.649.100	1.332.649.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerumahtn ggaan Sekretariat Daerah	4 Paket	1.282.342.400	BAGIAN UMUM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	296.081.900	296.081.900	245.249.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerumahtan ggaan Sekretariat Daerah	12 Paket	296.079.200	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 persen	80 persen	1.639.220.200	1.730.600.600	1.815.411.200			Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	80%	857.168.800	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	33 Laporan	1.421.862.900	1.459.152.300	1.558.296.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	33 Laporan	717.500.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	400 Laporan	63.384.000	77.384.000	63.050.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	66.471.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	3055 Laporan	153.973.300	194.064.300	194.064.300	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhanka m dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3055 Laporan	73.197.800	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN ORGANISASI				880.298.873	840.298.873	865.298.710							880.299.400	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				880.298.873	840.298.873	865.298.710							880.299.400	
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH				880.298.873	840.298.873	865.298.710							880.299.400	
1	4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGAT BAIK (88,32) Nilai	SANGAT BAIK (88,32) Nilai	880.298.873	840.298.873	865.298.710						SANGAT BAIK (89) Nilai	880.299.400	
							Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	34,48 persen	34,48 persen											
							Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	80,00 persen	80,00 persen											
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 persen	100 persen	35.503.000	15.272.600	13.409.600			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	100%	15.554.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	16.942.500	10.119.000	8.874.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10.054.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Pendapatan Bagi Hasil	Dokumen						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	18.560.500	5.153.600	4.535.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.500.000	BAGIAN ORGANISASI	
													Pendapatan Bagi Hasil								
		4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 persen	100 persen	151.494.600	151.462.600	117.355.600			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar	100%	118.180.000	BAGIAN ORGANISASI
		4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	6 Paket	69.182.000	65.932.000	34.332.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar	6 Paket	29.865.400	BAGIAN ORGANISASI	
		4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	84 Orang	84 Orang	82.312.600	85.530.600	83.023.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar	84 Orang	88.314.600	BAGIAN ORGANISASI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	24 OPD	24 OPD	693.301.273	673.563.673	734.533.510			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	26 OPD	746.565.400	BAGIAN ORGANISASI
		4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	6 Dokumen	182.005.100	172.976.300	250.466.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	6 Dokumen	182.878.800	BAGIAN ORGANISASI
														Pendapatan Bagi Hasil							
		4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	5 Laporan	248.560.940	248.642.540	242.699.710	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	5 Laporan	334.013.100	BAGIAN ORGANISASI
														Pendapatan Bagi Hasil							
		4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
								Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	232.479.900	221.689.500	210.927.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	3 Dokumen	199.571.500	BAGIAN ORGANISASI
														Pendapatan Bagi Hasil							
		4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	3 Dokumen	3 Dokumen	18.555.000	18.555.000	18.555.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.794.000	BAGIAN ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Pelayanan Publik dan Tata Laksana							Pendapatan Bagi Hasil						
	4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.700.333	11.700.333	11.885.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.308.000	BAGIAN ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				638.969.100,00	618.969.100,00	618.969.100,00						638.969.100		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				638.969.100,00	618.969.100,00	618.969.100,00						638.969.100		
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH				638.969.100,00	618.969.100,00	618.969.100,00						638.969.100		
1	4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	638.969.100,00	618.969.100,00	618.969.100,00						100%	638.969.100	
							Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E- Procurement	63,33 persen	63,33 persen											
	4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	159.849.100,00	159.849.100,00	155.341.500,00			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Program dan Kebijakan Pembangunan Daerah	10 bahan kebijakan	149.597.800	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	36.413.400,00	36.413.400,00	36.413.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	6 Dokumen	46.413.400	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	123.435.700,00	123.435.700,00	118.928.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	16 Laporan	103.184.400	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang	6 Nilai	6 Nilai	479.120.000,00	459.120.000,00	463.627.600,00			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Perangkat Daerah	7 Nilai	489.371.300	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							telah mencapai Level 3 (Proaktif)								tansformasi pelayanan publik	Publik Berbasis Teknologi Informasi				BARANG/ JASA
							SKM Layanan UKPBJ	BAIK (82,5) Nilai	BAIK (82,5) Nilai											
	4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	80 Dokumen	275.471.400,00	260.471.400,00	264.836.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	80	238.765.100	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
																		Dokumen		
	4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	59.892.000,00	59.892.000,00	98.585.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2 Dokumen	111.942.200	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang	143.756.600,00	138.756.600,00	100.206.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	300 Orang	138.664.000	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar, difokuskan pada pencapaian target-target indikator melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan:
Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan:
 - a. Menyusun peta kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar
 - b. Menyusun peta kebijakan perekonomian Kota Blitar
 - c. Melakukan percepatan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah melalui:
 - ✓ Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah anggota TPID / TPAKD dan Satgas Pangan
 - ✓ Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan antar Perangkat Daerah dan Sinergitas Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah
 - d. Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui:
 - ✓ Rebranding Tata Kelola BUMD
 - ✓ Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
 - ✓ Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
 - e. Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui:
 - ✓ Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan Economy Branding Kota Blitar
 - ✓ Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/Ekraf Kota Blitar
 - f. Memonev dan mengupdate kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama
 - g. Mengidentifikasi, menganalisa dan memetakan produk hukum daerah
3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan:
 - a. Peningkatan implementasi kebijakan P3DN
 - b. Optimalisasi pengelolaan LPSE
 - c. Optimalisasi pembinaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - d. Optimalisasi pembinaan kepada pelaku pengadaan barang/jasa
4. Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik):
Memonev dampak implementasi kebijakan RB General dan RB Tematik melalui reuiu renaksi dan monev renaksi secara berkala
5. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM:

- a. Pemanfaatan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM pada seluruh Perangkat Daerah
 - b. Menyusun kebijakan dan atau aturan terkait standar pelaporan SKM sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
 - c. Menyusun dan mensosialisasikan standart review SOP, SP dan Probis
6. Nilai rata - rata SKM Setda:
- a. Menyusun manajemen data yang lebih tertib
 - b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS
 - c. Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI
 - d. Menyusun standar pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan
 - e. Mengintensifkan pembinaan terhadap insan media massa
 - f. Mengintensifkan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan tentang standar keprotokolan
 - g. Melakukan optimalisasi dan perencanaan kebutuhan dengan lebih tepat sasaran selama tahun yang berkenaan
 - h. Mengevaluasi kinerja pelayanan secara berkala serta menciptakan inovasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan
7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah:
- a. Memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih optimal dalam melakukan pengumpulan data kinerja organisasi
 - b. Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar ini, tidak hanya sekedar memenuhi amanat dan menggugurkan kewajiban dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, namun diharapkan memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tahun 2024. Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini juga sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Perubahan Tahun 2024 yang dalam penyusunannya mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tribulan II tahun 2024.

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peranan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Rencana Kerja (Renja)) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Bagian-bagian dan seluruh pelaksana Sekretariat Daerah Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - o melaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - o menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan nya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2024 ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta diperlukan komitmen, dedikasi dan kerja keras dari

sumber daya di masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.